

ANALYSIS INFLUENCE OF E-PROCUREMENT AGAINST GOOD GOVERNANCE IN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK OF INDONESIA

G.N. Hadi Budidharma

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

ABSTRACT

Good governance is based on the implementation of government legislation, public policies that are transparent, as well as the participation and public accountability. Institutions of good governance includes the state or the government, private sector or the business world and society. Good governance is defined as the activity of the synergistic relationship between the state, private sector and communities. The utilization of information and communication technology in government or often called e-procurement with good information technology support and implementing integrity is believed to be vital in attaining good governance. Through the implementation of e-procurement, is expected various principles of good governance are able to materialize in governance so that corruption and bad actions in the governance process can be eliminated. This study aims to demonstrate empirically the effect of e-procurement to good governance in the ministry of religious institutions. The method of statistical analysis used is multiple regression. These results indicate that e-procurement is measured by principles such as efficient, effective, transparent, open, fair and accountable have a significant impact on good governance, while the principle of competitiveness does not have a significant effect on good governance.

Keywords: E-Procurement Efficient, Effective, Transparent, Open, Competitiveness, fair, accountable and good governance.

ABSTRAK

Tata pemerintahan yang baik didasarkan pada implementasi peraturan pemerintah, kebijakan publik yang transparan, serta partisipasi dan akuntabilitas publik. Lembaga-lembaga pemerintahan yang baik termasuk negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia bisnis dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai aktivitas hubungan sinergis antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan atau sering disebut e-procurement dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan integritas implementasi diyakini sangat penting dalam mencapai tata pemerintahan yang baik. Melalui implementasi e-procurement, diharapkan berbagai prinsip tata kelola yang baik dapat terwujud dalam tata kelola sehingga korupsi dan tindakan buruk dalam proses pemerintahan dapat dihilangkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh e-procurement terhadap good governance dalam pelayanan institusi keagamaan. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil ini menunjukkan bahwa e-procurement diukur dengan prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, adil dan akuntabel memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola yang baik, sementara prinsip daya saing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola yang baik.

Kata kunci: E-Procurement Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Daya Saing, adil, akuntabel dan tata kelola yang baik.

PENDAHULUAN

Pada saat ini tuntutan akan percepatan dalam pemberantasan korupsi menjadi suatu prioritas. Proses birokrasi dan pelayanan di setiap lembaga kementerian menjadi titik tolak untuk meminimalisir adanya celah dalam melakukan tindakan yang akan merugikan negara. Dalam proses penyelenggaraan negara yang baik, prinsip efisiensi, efektif, transparansi, terbuka, adil, meningkatnya daya saing dan akuntabilitas di lembaga kementerian menjadi hal yang mutlak. Pengadaan barang dan jasa di lembaga kementerian menjadi bagian yang sangat rawan dengan kegiatan praktik – praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan atau yang sering di sebut e-procurement dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan pelaksana yang mempunyai integritas dipercaya akan sangat membantu pencapaian good governance.

Melalui penerapan e-procurement, diharapkan berbagai prinsip-prinsip dari good governance mampu terwujud dalam tata pemerintahan sehingga korupsi dan berbagai tindakan buruk dalam proses pemerintahan bisa dihilangkan. Keuntungan penggunaan e-procurement secara makro yaitu; terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara konvensional, dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional (Jasin dkk, 2007). Salah satu tujuan e-procurement adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, e-procurement menjadi suatu sistem penyediaan barang dan jasa secara elektronik yang akan meningkatkan efektifitas, efisiensi, lebih terbuka, adil dan transparan dalam pelaksanaannya yang dapat meningkatkan persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian Darnayanti dan Hamzah (2007) terkait pengaruh e-procurement terhadap good governance menunjukkan bahwa secara parsial variabel efisiensi dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap good governance sedangkan variabel efektifitas, daya saing dan tanggung jawab tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap good governance.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Organisasi Modern

Salah satu aliran besar dalam teori organisasi adalah teori modern, yang kadang-kadang disebut juga analisa sistem. Menurut J. William Schulze dalam Sutarto (2012 : 23) menyatakan, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang lingkup kerja dan segala hal yang berhubungan dengannya, yang disatukan dalam sebuah hubungan yang teratur dan sangat efektif untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan. Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka. Interaksi dinamis antar proses, bagian dan fungsi dalam suatu organisasi, maupun dengan organisasi lain dan dengan

lingkungan. Teori Organisasi Modern; terdiri atas berbagai pandangan, konsep, dan teori yang berorientasi pada sistem dan dikembangkan atas dasar penelitian empiris. Para ahli teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang adaptif, agar dapat bertahan, harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Keterkaitan diterapkannya e-procurement pada proyek pengadaan barang dan jasa dilembaga pemerintahan adalah untuk meminimalkan adanya tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1974) yaitu Teori Agensi (*Agency Theory*). Menurut teori Jensen dan Meckling yang dikutip Joni Emirzon (2007) dalam Sony dkk (2009) menjelaskan bahwa “Hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principal*) memberikan tugas kepada pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Hubungan inilah yang dinamakan teori keagenan”. Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Jenis-Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Perpres Nomor 70 tahun 2012 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan Penyedia Jasa dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa Umum. Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas. Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan Langsung. Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pengadaan Langsung. Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pengadaan Barang/Jasa/Seleksi/Penunjukan Langsung.
5. Penunjukan Langsung. Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Siklus Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Siklus pengadaan barang/jasa adalah tata-urut proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai penyerahan kepada yang berwenang: (1) Tahap Perencanaan Pengadaan; (2) Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; (3) Tahap Manajemen Kontrak

Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat pada proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah membutuhkan suatu sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. E-Procurement atau pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet menjadi solusi yang tepat. E-Procurement tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit-belit akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Adanya e-procurement bertujuan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme, juga mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan di era informatika. Vaidya dan Sajeev (2006), menjelaskan pengertian e-procurement mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa/proses e-procurement, yang meliputi pencarian, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan evaluasi pembelian.

“E-procurement refers to the use of internet-based (integrated) information and communications technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review”(p, 70)

Menurut Simon dan Alistair (2005), proses procurement mencakup kebutuhan identifikasi dan spesifikasi oleh pengguna, melalui tahap pencarian dan negosiasi dalam kontrak dan penempatan pemesanan, yang terdiri dari mekanisme pendaftaran penerimaan, pembayaran dimuka dan evaluasi pendukung.

“The procurement process encompasses the initial need identification and specification by users, through the search, sourcing and negotiation stage of contracts and order placement and on to include mechanisms that register receipt, trigger payment and support post-supply evaluation”

Landasan Hukum *E-Procurement*

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement yang dilakukan Kementerian Agama diatur dalam undang - undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 17/SE/M/2010 tgl. 29 Nopember 2010 mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement). (sumber: Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Agama, 2011).
4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Good Governance

Good governance menjadi prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan serta cita-cita tersebut, maka terdapat Sepuluh prinsip utama good governance yang diungkapkan oleh UNDP yang perlu dipahami dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Sepuluh prinsip utama good governance, yaitu: 1. Participation; 2. Rule of law; 3. Transparency; 4. Responsiveness; 5. Consensus orientation; 6. Equity; 7. Efficiency and Effectiveness; 8. Accountability; 9. Strategic vision; dan 10. Professionalism. Kesepuluh prinsip tersebut, merupakan bagian yang

penting dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasi, dan pertanggung jawabannya dalam bingkai good governance.

Penelitian Terdahulu Terkait *E-Procurement*

Penelitian Darnayanti dan Hamzah (2007) terkait pengaruh e-procurement terhadap good governance menunjukkan bahwa secara parsial variabel efisiensi dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap good governance sedangkan variabel efektifitas, daya saing dan tanggung jawab tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap good governance. Penelitian yang berkaitan dengan e-procurement juga dilakukan oleh Anggun Ratna Asih (2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) memiliki pengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai di pemerintahan kota Cimahi.

Hipotesis

Pengadaan secara elektronik didefinisikan dalam penelitian ini sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, baik untuk satu atau seluruh tahapan pengadaan, dari pengumuman pengadaan sampai dengan evaluasi pengadaan. Dengan demikian metode pengadaan barang/jasa mencakup e-tendering maupun e-purchasing, yaitu proses pemilihan penyedia barang dan jasa serta pemanfaatan katalog elektronik. Tujuan utama dari sistem pengadaan secara elektronik adalah efisiensi dalam pengadaan barang/jasa yang dicapai melalui pengurangan harga barang/jasa yang harus dibayar oleh pemerintah serta pengurangan transaction cost yang terjadi selama proses pengadaan. Dalam penelitian ini diberikan hipotesis yang menunjukkan ada hubungan atau adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebagai variabel independen adalah prinsip-prinsip e-procurement sedangkan untuk variabel dependennya adalah good governance. Pada penelitian ini hipotesis yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Variabel efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- b. Variabel efektifitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- c. Variabel transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- d. Variabel terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- e. Variabel daya saing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- f. Variabel adil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.
- g. Variabel akuntabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.

Desain Penelitian

Untuk jenis penelitian ini merupakan uji penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dimana pengaruh antara variabel dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan ukuran-ukuran statistika yang relevan atas data tersebut untuk menguji hipotesis (Sugiono,2012). Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis (hypothesis testing) dengan melakukan pengujian hubungan terhadap variabel yang diteliti (casual research). Penelitian ini dilakukan dengan cara survey terhadap responden yang menggunakan atau terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) di Lembaga Kementerian Agama wilayah Jakarta. Adapun data yang dibutuhkan untuk analisis dikumpulkan melalui kuesioner yang telah disusun peneliti.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna E-Procurement di Lembaga Kementerian Agama Jakarta.

Teknik Sampling

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Probability Sampling Probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Pengertian simple random sampling menurut Sugiyono (2012:118) adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna (user) sistem pengadaan barang dan jasa di Lembaga Kementerian Agama wilayah Jakarta, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di lingkungan Kementerian Agama dan para vendor sebagai peserta lelang yang diadakan di Lembaga Kementerian Agama wilayah Jakarta. Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

n = Jumlah sampel penelitian

N = Populasi penelitian

Moe = margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

Jumlah pengguna(user) yaitu panitia dan peserta lelang E-Procurement di Lembaga Kementerian Agama periode tahun 2013 sebesar 500 orang. Dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel yang digunakan adalah 84 Responden.

Teknik Pengumpulan Data

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Library Research adalah proses pengumpulan data bersifat teoritis melalui buku-buku, literatur, atau bahan-bahan dari perkuliahan, majalah surat kabar, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- Penelitian Lapangan (*Field Research*). Field Research adalah proses pengumpulan data bersifat aktual melalui pengamatan langsung dengan mengedarkan kuesioner. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel adalah kuisisioner yang isinya berhubungan dengan variabel prinsip-prinsip E-Procurement dan Good Governance.

Skala dalam penyusunan kuisisioner mengacu pada skala likert dengan alasan, skala likert cukup sederhana dan banyak digunakan memakai lima tingkatan. Tingkatan yang dimaksud dimulai dari bobot 1 untuk penilaian paling rendah dan bobot 5 untuk penelitian yang paling tinggi.

Variabel Independen atau Variabel Bebas

Dalam penelitian ini sebagai variabel independennya adalah tujuh prinsip dari E-Procurement, prinsip-prinsip E-Procurement adalah 1) Prinsip Efisien, 2) Prinsip Efektif, 3) Prinsip Transparan, 4) Prinsip Terbuka, 5) Prinsip Bersaing, 6) Prinsip Adil, 7) Prinsip Akuntabel. Variabel Efisien (X1) memiliki 6 indikator pertanyaan, variabel Efektif (X2) memiliki 7 indikator pertanyaan, variabel Transparan (X3) memiliki 5 indikator pertanyaan, sedangkan variabel Terbuka (X4) memiliki 5 indikator pertanyaan, variabel Daya Saing (X5) memiliki 6 indikator pertanyaan, variabel Adil (X6) memiliki 7 indikator pertanyaan sedangkan variabel akuntabel (X7) memiliki 8 indikator pertanyaan.

Variabel Dependen / Variabel Terikat

Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah Good Governance. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip-prinsip Good Governance adalah (1) Partisipasi (2) Penegakan hukum (3) Transparansi (4) Kesetaraan (5) Daya tanggap (6) Wawasan ke depan (7) Akuntabilitas (8) Pengawasan (9) Efisiensi & Efektifitas (10) Profesionalisme. Untuk indikator-indikator variabel Good Governance (Y) memiliki 26 indikator pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Index Tanggapan Responden

1. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Efisien

Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Efisien

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X1.1	3	5	7	37	32	68.4
Indikator X1.2	2	3	6	33	40	71.6
Indikator X1.3	1	4	6	41	32	70.2
Indikator X1.4	2	6	3	39	34	69.8
Indikator X1.5	0	1	7	49	27	70.8
Indikator X1.6	0	1	8	51	24	70

$$\text{Nilai Indeks} = (68,4 + 71,60 + 70,2 + 69,8 + 70,8 + 70) / 6 = 70,13$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan adanya penilaian setuju yang tinggi terhadap efisien dalam pengadaan barang dan jasa dengan adanya e-procurement di Kementerian Agama, dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 70,13. Artinya tanggapan responden menunjukkan pengakuan yang cukup baik mengenai efisiensi di Kementerian Agama. Hal ini didukung oleh adanya fasilitas dan infrastruktur e-procurement yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Penilaian positif responden mengenai proses birokrasi yang cepat, hemat waktu dan biaya, interaksi, akses internet yang cepat kemudian sangat meminimalkan tingkat kebocoran uang negara.

2. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Efektif

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektif

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X2.1	0	0	2	49	33	73.4
Indikator X2.2	2	4	3	45	30	69.8
Indikator X2.3	0	2	3	51	28	71.4
Indikator X2.4	0	0	1	51	32	73.4
Indikator X2.5	2	3	5	44	30	69.8
Indikator X2.6	0	0	1	57	26	72.2
Indikator X2.7	0	0	3	48	33	73.2

$$\text{Nilai Indeks} = (73,4+69,8+71,4+73,4+69,8+72,2+73,2) / 7 = 71,89.$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap aspek efektif yang diberikan oleh e-procurement di Kementerian Agama, dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 71,89. Artinya dengan adanya e-procurement di Kementerian Agama, tanggapan responden mengenai peraturan lelang, jadwal lelang, penyusunan dokumen, perubahan jadwal lelang, peningkatan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan, tatacara pelaksanaan lelang dan pengurangan KKN sangat positif.

3. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Transparan

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Transparan

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X3.1	0	0	4	44	36	73.6
Indikator X3.2	0	0	2	43	39	74.6
Indikator X3.3	0	0	0	53	21	73.4
Indikator X3.4	0	3	6	47	28	73.2
Indikator X3.5	0	0	2	45	37	74.2

$$\text{Nilai Indeks} = (73,6+74,6+73,4+73,2+74,2) / 5 = 73,24$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar Responden memberikan tanggapan kesetujuan yang besar terhadap transparan proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama, yaitu dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 73,24. Artinya responden memberikan penilaian yang baik terhadap transparansi pada penyelenggaraan lelang di Kementerian Agama.

4. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Terbuka

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Terbuka

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X4.1	0	0	3	39	42	75
Indikator X4.2	0	0	2	38	44	75.6
Indikator X4.3	0	0	5	46	33	72.8
Indikator X4.4	0	0	5	39	40	74.2
Indikator X4.5	0	0	4	49	31	72.6

$$\text{Nilai Indeks} = (75 + 75,6 + 72,8 + 74,2 + 72,6) / 5 = 74,04$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan kesetujuan yang cukup besar terhadap variabel terbuka (X4) yang diberikan oleh peserta lelang, dengan nilai indeks yang “tinggi” sebesar 74,04. Artinya responden menilai adanya jaminan kekeluasaan bagi masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama.

5. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Daya Saing

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Daya Saing

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X5.1	0	3	3	35	43	74
Indikator X5.2	0	0	2	48	34	73.6
Indikator X5.3	0	2	8	42	32	71.2
Indikator X5.4	0	0	4	41	39	74.2
Indikator X5.5	0	3	5	39	37	72.4
Indikator X5.6	0	2	5	38	39	73.2

$$\text{Nilai Indeks} = (74,00 + 73,6 + 71,2 + 74,2 + 72,6 + 73,2) / 6 = 62,66$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik terhadap prinsip daya saing e-procurement pada pelelangan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama. Tanggapan responden terhadap daya saing e-procurement dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 62,66.

6. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Adil

Tabel 6. Tanggapan Responden Mengenai Adil

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X6.1	0	0	7	42	35	72.8
Indikator X6.2	0	0	3	44	37	74
Indikator X6.3	0	3	4	40	37	72.6
Indikator X6.4	0	0	5	38	41	74.4
Indikator X6.5	0	0	8	44	32	72
Indikator X6.6	0	0	7	41	36	73
Indikator X6.7	0	0	9	37	38	73

$$\text{Nilai Indeks} = (72,8 + 74 + 72,6 + 74,4 + 72 + 73 + 73) / 7 = 73,11$$

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup adil dengan adanya sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama, dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 73,11.

7. Indeks Tanggapan Responden Mengenai Akuntabel

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan atas akuntabel pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement dengan nilai indeks yang “sedang” sebesar 72,07.

Tabel 7. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabel

Indikator	1	2	3	4	5	Nilai Index
Indikator X7.1	0	0	9	41	34	72.2
Indikator X7.2	0	0	10	42	32	71.6
Indikator X7.3	0	0	5	44	35	73.2
Indikator X7.4	0	0	6	46	32	72.4
Indikator X7.5	0	0	2	49	33	73.4
Indikator X7.6	0	3	4	51	36	70.4
Indikator X7.7	0	2	6	56	20	69.2
Indikator X7.8	0	2	4	37	41	73.8

$$\text{Nilai Indeks} = (72,2 + 71.6 + 73.2 + 72,4 + 73.4 + 70.4 + 69.2 + 73.8) / 8 = 72,07$$

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis korelasi. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan sebagai item yang valid. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Efisien

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X1.1	0.454	0.2146	Valid
X1.2	0.719	0.2146	Valid
X1.3	0.737	0.2146	Valid
X1.4	0.680	0.2146	Valid
X1.5	0.517	0.2146	Valid
X1.6	0.662	0.2146	Valid

Tabel 8 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel efisien yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 9. Hasil Pengujian Validitas Efektif

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X2.1	0.591	0.2146	Valid
X2.2	0.753	0.2146	Valid
X2.3	0.702	0.2146	Valid
X2.4	0.765	0.2146	Valid
X2.5	0.846	0.2146	Valid
X2.6	0.849	0.2146	Valid
X2.7	0.719	0.2146	Valid

Tabel 9 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel efektif yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 10. Hasil Pengujian Validitas Transparan

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X3.1	0.345	0.2146	Valid
X3.2	0.438	0.2146	Valid
X3.3	0.38	0.2146	Valid
X3.4	0.599	0.2146	Valid
X3.5	0.601	0.2146	Valid

Tabel 10 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 11. Hasil Pengujian Validitas Terbuka

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X4.1	0.432	0.2146	Valid
X4.2	0.485	0.2146	Valid
X4.3	0.527	0.2146	Valid
X4.4	0.335	0.2146	Valid
X4.5	0.427	0.2146	Valid

Tabel 11 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel terbuka yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 12. Hasil Pengujian Validitas Daya Saing

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X5.1	0.563	0.2146	Valid
X5.2	0.753	0.2146	Valid
X5.3	0.781	0.2146	Valid
X5.4	0.747	0.2146	Valid
X5.5	0.831	0.2146	Valid
X5.6	0.733	0.2146	Valid

Tabel 12 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel daya saing yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 13. Hasil Pengujian Validitas Adil

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X6.1	0.661	0.2146	Valid
X6.2	0.667	0.2146	Valid
X6.3	0.786	0.2146	Valid
X6.4	0.739	0.2146	Valid
X6.5	0.752	0.2146	Valid
X6.6	0.727	0.2146	Valid
X6.7	0.606	0.2146	Valid

Tabel 13 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel

adil yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 14. Hasil Pengujian Validitas Akuntabel

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X7.1	0.191	0.2146	Valid
X7.2	0.31	0.2146	Valid
X7.3	0.319	0.2146	Valid
X7.4	0.378	0.2146	Valid
X7.5	0.363	0.2146	Valid
X7.6	0.314	0.2146	Valid
X7.7	0.488	0.2146	Valid
X7.8	0.32	0.2146	Valid

Tabel 14 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2146. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Tabel 15. Hasil Pengujian Validitas Good Governance

Indikator	r hitung	r Tabel	Ket
Y1	0.313	0.2146	Valid
Y2	0.301	0.2146	Valid
Y3	0.758	0.2146	Valid
Y4	0,301	0.2146	Valid
Y5	0.866	0.2146	Valid
Y6	0.616	0.2146	Valid
Y7	0.666	0.2146	Valid
Y8	0.724	0.2146	Valid
Y9	0.646	0.2146	Valid
Y10	0.393	0.2146	Valid
Y11	0.469	0.2146	Valid
Y12	0.507	0.2146	Valid
Y13	0.575	0.2146	Valid
Y14	0.818	0.2146	Valid
Y15	0.789	0.2146	Valid
Y16	0.639	0.2146	Valid
Y17	0.703	0.2146	Valid
Y18	0.834	0.2146	Valid
Y19	0.656	0.2146	Valid
Y20	0.831	0.2146	Valid
Y21	0.827	0.2146	Valid
Y22	0.731	0.2146	Valid
Y23	0.613	0.2146	Valid
Y24	0.833	0.2146	Valid
Y25	0.709	0.2146	Valid
Y26	0.724	0.2146	Valid

Tabel 16. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Cut Off	Ket
Efisien (X1)	0.844	> 0.06	Reliabel
Efektif (X2)	0.917	> 0.06	Reliabel
Transparan (X3)	0.711	> 0.06	Reliabel
Terbuka (X4)	0.686	> 0.06	Reliabel
Daya Saing (X5)	0.903	> 0.06	Reliabel
Adil (X6)	0.899	> 0.06	Reliabel
Akuntabel (X7)	0.641	> 0.06	Reliabel
Good Governance (Y)	0.954	> 0.06	Reliabel

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas. Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik P-P Plot. Data yang normal adalah data yang membentuk titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil analisis regresi linier dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual error model regresi diperoleh sudah menunjukkan adanya pola grafik yang normal, yaitu adanya sebaran titik yang berada tidak jauh dari garis diagonal.

Tabel 17. Kosmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		84
Normal	Mean	0
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	0.5974819
Most Extreme	Absolute	0.098
Differences	Positive	0.098
	Negative	-0.095
Kolmogorov-Smirnov Z		0.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari Tabel 17 hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan kolmogorov smirnov test tersebut menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) adalah sebesar 0.394, nilai ini lebih besar dari $\alpha=0.05$. Jadi dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Pengujian Multikolonieritas. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan

menggunakan nilai VIF. Suatu variabel Menunjukkan gejala multikolonieritas bisa dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang tinggi pada variabel-variabel bebas suatu model regresi. Nilai VIF dari variabel bebas pada model regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Pengujian Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Ket
Efisiensi(X1)	0.929	1.077	Tidak terdapat Multikol
Efektifitas(X2)	0.92	1.087	Tidak terdapat Multikol
Transparansi(X3)	0.875	1.143	Tidak terdapat Multikol
Terbuka(X4)	0.854	1.172	Tidak terdapat Multikol
Daya Saing (X5)	0.919	1.088	Tidak terdapat Multikol
Adil (X6)	0.837	1.195	Tidak terdapat Multikol
Akuntabel (X7)	0.9	1.111	Tidak terdapat Multikol

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance dari hasil regresi berganda juga menunjukkan semua variabel tersebut lebih besar dari 0.10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas.

Pengujian Hipotesis

Tabel 19. Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.205	0.909		4.625	0		
EFISIEN	0.012	0.111	0.013	0.108	0.041	0.929	1.077
EFEKTIF	0.047	0.106	0.052	0.442	0.026	0.92	1.087
TRANSPARAN	0.043	0.131	0.04	0.33	0.014	0.875	1.143
TERBUKA	0.051	0.13	0.048	0.39	0.06	0.854	1.172
DAYA_SAING	0.136	0.106	0.151	1.28	0.204	0.919	1.088
ADIL	0.072	0.115	0.077	0.624	0.035	0.837	1.195
AKUNTABEL	0.06	0.16	0.045	0.375	0.031	0.9	1.111

a. Dependent Variable: G_GOVERN

Uji Parsial (Uji t)

a. Variabel Efisien terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel efisien menunjukkan nilai $t = 2,108$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah $0,05$ tersebut menunjukkan bahwa variabel efisien dari e-procurement memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap good governance. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa prinsip dari e-procurement yaitu efisien memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin tinggi tingkat efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement akan semakin tinggi pula good governance di Kementerian Agama, sebaliknya apabila semakin rendah tingkat efisiensi semakin rendah pula good governance.

b. Variabel Efektif terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kehandalan (reliability) menunjukkan nilai $t = 3,442$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah $0,05$ tersebut menunjukkan bahwa variabel efektif dari e-procurement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa variabel efektif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin tinggi tingkat efektifitas akan semakin tinggi pula good governance, sebaliknya semakin rendah tingkat efektifitas dari e-procurement maka semakin rendah pula good governance.

c. Variabel Transparan terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel transparan menunjukkan nilai $t = 2,330$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah $\alpha = 0,05$ tersebut, menunjukkan bahwa variabel transparan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Hal ini berarti hipotesis ketiga diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa transparan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin tinggi transparansi yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama maka semakin tinggi pula good governance, sebaliknya semakin rendah transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama semakin rendah pula good governance.

d. Variabel Terbuka terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel jaminan (assurance) menunjukkan nilai $t = 3,390$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah $0,05$ tersebut menunjukkan bahwa variabel terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.

Hal ini berarti hipotesis keempat diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa keterbukaan dalam e-procurement mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin besar keterbukaan yang diberikan dari e-procurement pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama maka akan semakin tinggi pula good governance, sebaliknya semakin rendah keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama maka semakin rendah pula good governance.

e. Variabel Daya Saing terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kepedulian (empathy) menunjukkan nilai $t = 2,280$ dengan nilai signifikan sebesar $0,204 > 0,05$. Dengan nilai signifikansi di atas $0,05$ tersebut menunjukkan bahwa daya saing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Daya saing dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama belum

menunjukkan hal yang positif, hal ini diduga belum seluruh vendor yang memiliki kualifikasi baik ikut berpartisipasi pada pelelangan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama.

f. Variabel Adil terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kepedulian (empathy) menunjukkan nilai t = 2,624 dengan nilai signifikan sebesar $0,035 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa variabel adil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis keenam diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa adil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin besar prinsip keadilan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula good governance, sebaliknya semakin rendah prinsip keadilan yang diberikan maka semakin rendah pula good governance.

g. Variabel Akuntabel terhadap Good Governance

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel akuntabel menunjukkan nilai t = 3,375 dengan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap good governance. Semakin besar akuntabilitas yang diberikan akan semakin tinggi pula good governance, sebaliknya semakin rendah akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa semakin rendah pula good governance.

Uji F (Uji Simultan)

Hasil perhitungan regresi secara bersama-sama diperoleh pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20. Uji Simultan

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.04	7	0.149	22.381	.031 ^a
	Residual	29.63	76	0.39		
	Total	30.67	83			

a. Predictors: (Constant), AKUNTABEL, TERBUKA, DAYA_SAING, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, ADIL

b. Dependent Variable: G_GOVERN

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 22,381 dengan signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel efisien, efektif, transparan, terbuka, daya saing, adil dan akuntabel mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap good governance.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square.

Tabel 21. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.634	.616	.062439	1.882

Sumber: Data primer yang diolah 2014

- a. Predictors: (Constant), AKUNTABEL, TERBUKA, DAYA_SAING, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, ADIL
- b. Dependent Variable: G_GOVERN

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) yang diperoleh sebesar 0,616. Hal ini berarti 61,6 % tata kelola yang baik (good governance) dapat dijelaskan oleh variabel efisien, efektif, transparan, terbuka, daya saing, adil dan akuntabel sedangkan sisanya yaitu 38,4 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa simpulan yang diperoleh terkait prinsip-prinsip e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa terhadap good governance di Kementerian Agama. Adapun kesimpulan berdasarkan tiap-tiap hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Efisien Terhadap Good Governance, Bahwa secara statistik menunjukkan e-procurement yang diukur dengan prinsip efisien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (2) Efektif Terhadap Good Governance, Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip efektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (3) Transparan Terhadap Good Governance, Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip transparan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (4) Terbuka Terhadap Good Governance Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (5) Daya Saing Terhadap Good Governance, Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip daya saing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (6) Adil Terhadap Good Governance, Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip adil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance. (7) Akuntabel Terhadap Good Governance, Hasil statistik menunjukkan bahwa e-procurement yang diukur dengan prinsip akuntabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance.

Saran

Diharapkan informasi terkait pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement di Kementerian Agama mengundang vendor-vendor yang cukup ternama dan memiliki reputasi dan kualifikasi baik untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk meningkatkan daya saing. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas hipotesisnya terkait e-procurement dan menggunakan variabel moderating atau intervening sebagai modelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nanan, (2011). *Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur* (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol).
- Achmad Kuncoro, Engkos. Dan Riduwan. (2008). *Cara menggunakan dan memaknai Analisis Jalur*. Bandung : Alfabeta
- Anggun Ratna Asih, (2013). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Anthony Flynn and Paul Davis (2014). "Theory In Public Procurement Research" *Journal Of Public Procurement*, 14 (21), 139-180.
- Danaryanti, Hamzah (2007). *Pengaruh E-Procurement Terhadap Good Governance*. Universitas Trunojoyo.
- Dedi A Nugroho, (2011). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan Dan Praktek Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. Skripsi tidak dipublikasikan Universitas Mercubuana Jakarta.
- Effendi, Taufiq (2007). *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 dari World Wide Web: <http://www.setneg.go.id>
- Ferdinand, (2011). *Metode Penelitian Manajemen*, Edisi 3 BP UNDIP: Semarang.
- Ghozali Imam, (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Ke empat, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk (2009). *Inovasi Layanan Publik melalui E-Procurement, diambil dari Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik di Bappenas*, Jakarta
- Jasin, Moh dkk.(2007). *Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: KPK.
- Kartikasari. (2007). *Pengaruh e-Procurement terhadap Pengadaan Barang pada Bagian Perlengkapan*. Surabaya: Univ. Bhayangkara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2011). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011*. Diakses pada tanggal 3 September 2014 dari World Wide Web : <http://www.kpk.go.id>
- Kementerian Agama. (2011). *Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik Tahun 2011*. Diakses pada tanggal 5 September 2014 dari World Wide Web : <http://www.kemenag.go.id>
- Lubis, Todung Mulya. (2006). *Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Transparency Internasional Indonesia.

- LKPP, (2010). *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia*, tahun 2010
- LKPP, (2013). *Jurnal Pengadaan "Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah"* ISSN: Volume 1 Number 1 Desember 2013.
- Nightsabha, I. Akyuna, Djoko Suhardjanto dan Bayu Tri Cahya, (2009). "Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement" *Jurnal Siasat Bisnis*, 13 (2), (Agustus 2009), 129–150.
- Purwanto. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putranto, Suryadhi Joko. (2007). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Rafiqul. (2007). *Publik Procurement and Contracting in Bangladesh: An Analysis of the Perceptions of Civil Servants*. *Journal of Public Procurement*, Boca Raton. 7, 31-50.
- Rahardjo, Agus. (2007). *E-Governance Awards 2007*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 dari World Wide Web: <http://www.wartaekonomi.co.id>
- Simon R. Croom and Alistair Brandon-Jones, (2005). "Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and operation In The Public Sector", 5 (1), 367
- Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng. (2009). *Corporate Governance Concept And Model (Preserving True Organization Welfare)*, Center For Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, (2012). *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, cet ke 22.
- Sutedi, Adrian, (2010). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar grafika: Jakarta.
- Vaidya, K., Callender, G., Sajeev, A.S.M., Goa, J. (2006). "Towards a Model for Measuring the Performance of e-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balanced Scorecard Approach", A paper prepared for the Australian Electronic Governance Conference, University of Melbourne, Melbourne Victoria.
- Van Weele, Arjen. (2010). *Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice*. Hampshire: Cengage Learning EMEA.
- Yahya Marzuqi, (2012). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Askara

Peraturan Perundang-undangan

- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik
- Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No.8 Tahun 2006. Tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
- Perpres No.54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perpres No.70 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Permen PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Surat Edaran Menteri Agama Nomor:17/SE/M/2010 tanggal 29 September 2010 tentang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik